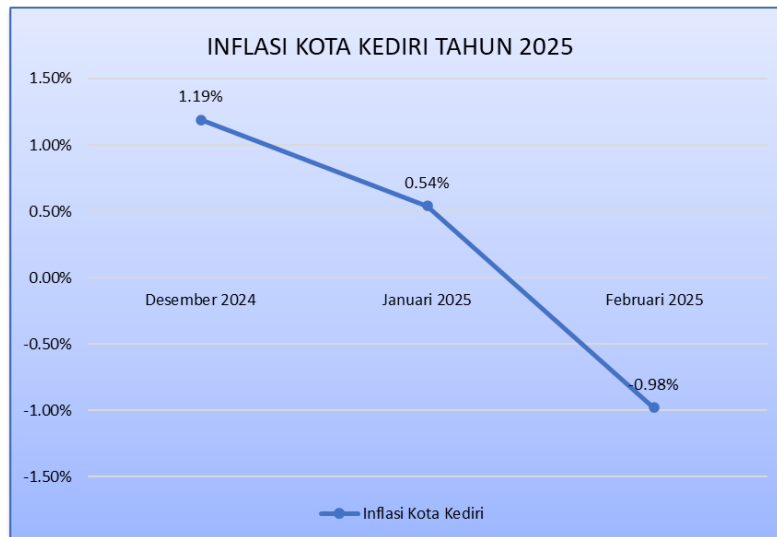


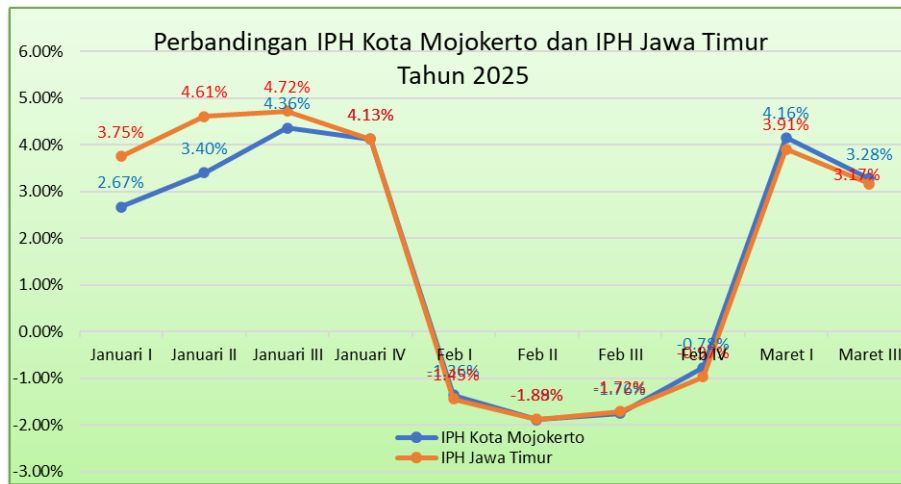
1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

◦ **Inflasi Daerah:** Kota Mojokerto merupakan **Kota Non-IHK**, sehingga angka inflasinya mengacu pada **Kota Kediri sebagai Sister City**. Inflasi Kota Kediri menunjukkan fluktuasi pada awal tahun 2025 (*Sumber BPS Kota Kediri*) yakni:

1. **Bulan Januari 2025 sebesar 54% (year on year)**
2. **Bulan Februari 2025 sebesar -0.98% (year on year)**



- Pada awal tahun 2025, Kota Mojokerto, sebagai kota Non-IHK yang mengacu pada data inflasi Kota Kediri, menunjukkan dinamika harga yang signifikan. Inflasi Kota Kediri tercatat sebesar **54% (year on year)** pada bulan **Januari 2025**. Namun, sebagai *proxy* untuk memahami perkembangan harga di tingkat lokal, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Mojokerto memberikan gambaran yang lebih detail yakni (*sumber data BPS Kota Mojokerto*):



- **Bulan Januari 2025** menjadi periode awal tekanan harga. IPH Kota Mojokerto menunjukkan peningkatan yang dipicu oleh kenaikan harga beberapa komoditas pokok yang signifikan. **Cabai rawit** menjadi penyumbang utama dengan harga rata-rata mencapai **Rp 82.500 per kilogram**. Lonjakan harga juga terjadi pada **cabai merah** yang mencapai **Rp 55.000 per kilogram**, serta **telur ayam ras** yang naik hingga **Rp 29.500 per kilogram**. Kenaikan harga pada komoditas-komoditas ini memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan IPH pada bulan Januari.
- Memasuki **bulan Februari 2025**, terjadi perubahan tren. IPH Kota Mojokerto mengalami penurunan. Penurunan harga yang paling signifikan terjadi pada **bawang merah**, yang turun menjadi **Rp 26.000 per kilogram** dari harga sebelumnya sebesar Rp 34.500 per kilogram pada Januari. **Cabai rawit** juga mengalami koreksi harga yang cukup besar, turun drastis menjadi **Rp 46.500 per kilogram** dari puncaknya di Januari. Selain itu, harga **daging ayam ras** juga mengalami penurunan tipis menjadi **Rp 31.750 per kilogram** dari Rp 33.500 per kilogram pada bulan sebelumnya. Penurunan harga pada komoditas-komoditas ini berhasil menekan IPH Kota Mojokerto ke zona negatif.
- Namun, tren penurunan harga tidak bertahan lama. Memasuki **bulan Maret 2025**, terutama seiring dengan datangnya Bulan Ramadhan dan persiapan menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, IPH Kota Mojokerto kembali mengalami peningkatan. **Cabai rawit** kembali menjadi sorotan dengan kenaikan harga yang signifikan, mencapai **Rp 91.500 per kilogram**, melampaui harga tertingginya di bulan Januari. Harga **bawang merah** juga mengalami kenaikan yang cukup tajam, mencapai **Rp 43.500 per kilogram**. Selain itu, harga **cabai merah** juga kembali naik hingga mencapai **Rp 57.500 per kilogram**. Peningkatan permintaan selama bulan Ramadhan diduga menjadi faktor utama pendorong kenaikan harga pada komoditas-komoditas ini.
- Secara keseluruhan, pada Triwulan I Tahun 2025 di Kota Mojokerto diwarnai oleh fluktuasi harga komoditas pokok yang cukup signifikan. Harga cabai rawit dan bawang merah menunjukkan volatilitas yang tinggi, menjadi penyumbang utama perubahan IPH. Telur ayam ras dan daging ayam ras juga memberikan kontribusi terhadap dinamika harga. Peristiwa penting seperti Bulan Ramadhan terbukti memberikan tekanan inflasi pada beberapa komoditas.
- Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi selama periode ini, termasuk operasi pasar murah, sidak pasar, dan pemberian subsidi transportasi. Namun, fluktuasi harga komoditas pokok tetap menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas harga di daerah ini. Pemantauan harga dan upaya

pengendalian yang lebih terstruktur dan berkelanjutan akan sangat penting untuk menghadapi potensi risiko inflasi di masa mendatang, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional lainnya.

- Melihat perkembangan inflasi dan harga di Kota Mojokerto hingga Triwulan I Tahun 2025, beberapa risiko signifikan perlu diantisipasi dan diwaspadai untuk periode mendatang. Risiko-risiko ini dapat mempengaruhi stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Kota Mojokerto yakni:

- **Volatilitas Harga Komoditas Pokok:** Risiko utama yang terus membayangi adalah volatilitas harga komoditas pokok, terutama **cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah**. Data IPH menunjukkan bahwa komoditas-komoditas ini secara berulang menjadi penyumbang utama fluktuasi harga. Kenaikan harga yang tajam pada komoditas ini, seperti yang terjadi di awal Januari dan Maret, dapat memberikan tekanan inflasi yang signifikan. Faktor-faktor seperti perubahan cuaca ekstrem, potensi gagal panen di daerah penghasil, serta dinamika permintaan dan penawaran yang cepat berubah dapat memicu volatilitas ini.
- **Dampak Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN):** Bulan Ramadhan yang terjadi di Triwulan I menjadi contoh nyata bagaimana HBKN dapat mempengaruhi harga. Peningkatan permintaan signifikan menjelang dan selama periode tersebut mendorong kenaikan harga pada beberapa komoditas, terutama cabai dan bawang merah. Risiko ini akan kembali menjelang **Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah** yang diperkirakan jatuh pada **bulan April 2025**. Peningkatan permintaan yang lebih tinggi pada periode ini berpotensi memicu lonjakan harga yang lebih besar jika tidak diantisipasi dengan baik.
- **Potensi Gangguan Rantai Pasokan:** Meskipun upaya sidak telah dilakukan, potensi gangguan dalam rantai pasokan tetap menjadi risiko. Hambatan logistik, masalah transportasi, atau praktik penahanan barang oleh oknum tertentu dapat menyebabkan kelangkaan pasokan di pasar, yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan harga. Risiko ini perlu terus diwaspadai, terutama untuk komoditas yang pasokannya bergantung pada distribusi dari luar daerah.
- **Ketergantungan pada Inflasi Kota Kediri:** Status Kota Mojokerto sebagai kota Non-IHK yang mengacu pada data inflasi Kota Kediri membawa risiko tersendiri. Perubahan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi inflasi di Kota Kediri, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi lokal Kota Mojokerto, secara tidak langsung akan mempengaruhi persepsi dan data inflasi di Kota Mojokerto. Hal ini dapat menyulitkan pengambilan kebijakan yang sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik Kota Mojokerto.
- **Faktor Musiman dan Cuaca:** Selain HBKN, faktor musiman dan kondisi cuaca juga dapat menjadi risiko berkelanjutan. Perubahan musim yang mempengaruhi **produksi pertanian di daerah penghasil**, seperti musim hujan berkepanjangan atau kemarau ekstrem, dapat berdampak pada ketersediaan dan harga komoditas bahan pangan dikarenakan **Kota Mojokerto bukan daerah penghasil pertanian**.
- **Potensi Kenaikan Biaya Produksi dan Distribusi:** Kenaikan harga bahan bakar atau biaya transportasi secara umum dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi komoditas, yang pada akhirnya dapat diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi.
- **Risiko Inflasi Imported:** Meskipun fokus utama adalah pada komoditas lokal, potensi inflasi *imported* akibat kenaikan harga barang dan jasa global, serta fluktuasi nilai tukar Rupiah, juga perlu diwaspadai. Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat pada IPH yang lebih fokus pada komoditas pokok, namun dapat

mempengaruhi harga barang dan jasa lainnya.

- Mengelola risiko-risiko ini memerlukan upaya berkelanjutan dari Pemerintah Kota Mojokerto. Pemantauan harga yang lebih intensif, penguatan koordinasi dengan daerah penghasil, pengawasan distribusi yang lebih efektif, serta strategi intervensi pasar yang tepat sasaran dan berkelanjutan akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat di Kota Mojokerto ke depannya. Komunikasi yang efektif kepada masyarakat mengenai potensi risiko dan upaya pemerintah juga menjadi bagian penting dalam mitigasi risiko inflasi.

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- **Dominasi Komoditas Tertentu dalam Fluktuasi Harga:** Permasalahan utama terletak pada tingginya ketergantungan IPH Kota Mojokerto pada fluktuasi harga beberapa komoditas pokok. **Cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah** secara konsisten muncul sebagai komoditas yang paling signifikan mempengaruhi perubahan IPH. Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah menjadikan harga komoditas ini sangat rentan terhadap dinamika produksi dan distribusi di daerah penghasil.
- **Volatilitas Harga yang Tinggi:** Harga komoditas-komoditas dominan tersebut menunjukkan tingkat volatilitas yang cukup tinggi dalam periode singkat. Contohnya, harga cabai rawit melonjak signifikan di Januari, turun drastis di Februari, dan kembali melonjak di Maret. Volatilitas ini semakin menantang karena Kota Mojokerto tidak memiliki kendali langsung terhadap produksi komoditas tersebut.
- **Kerentanan Terhadap Pasokan dan Distribusi dari Luar Daerah:** Sebagai daerah non-penghasil, Kota Mojokerto sepenuhnya bergantung pada kelancaran pasokan bahan pangan dari daerah lain. Gangguan pada produksi di daerah penghasil akibat cuaca, gagal panen, atau masalah logistik dan transportasi dapat dengan cepat berdampak pada ketersediaan dan harga di Kota Mojokerto. Sidak pasar dan distributor menunjukkan adanya kekhawatiran terkait potensi hambatan distribusi dari luar daerah.
- **Keterbatasan Data Inflasi Lokal:** Sebagai kota Non-IHK, Kota Mojokerto bergantung pada data inflasi Kota Kediri. Hal ini mungkin kurang mencerminkan kondisi harga dan inflasi spesifik di Kota Mojokerto, sehingga menyulitkan penentuan kebijakan yang sepenuhnya tepat sasaran.
- **Potensi Permasalahan Distribusi:** Meskipun telah dilakukan sidak, potensi penahanan barang atau inefisiensi dalam rantai distribusi masih menjadi risiko. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak semestinya.
- **Efektivitas Intervensi Pasar Jangka Pendek:** Operasi pasar dan pasar murah menjadi respons utama, terutama menjelang HBKN. Namun, efektivitas jangka panjang dari intervensi ini dalam menstabilkan harga secara berkelanjutan perlu dievaluasi lebih mendalam.
- **Realisasi Anggaran Bantuan Transport yang Belum Optimal:** Dari pagu anggaran Belanja Bantuan Transport sebesar **Rp 42.259.300**, realisasi hingga saat ini adalah sebesar **Rp 11.835.940** untuk 65 kali pengiriman komoditas. Ini menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara maksimal, yang bisa jadi mengindikasikan adanya kendala dalam implementasi atau kebutuhan yang belum terpenuhi sepenuhnya.

## 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Kota Mojokerto telah melaksanakan berbagai kebijakan pengendalian inflasi

berdasarkan strategi 4K dengan rincian sebagai berikut:

**I. Keterjangkauan Harga:**

- a. **Pemantauan harga Bapokting harian** oleh petugas Diskopukmperindag maksimal pukul 09.00 WIB di Pasar Tanjung Anyar dan Pasar Prajuritkulon dan dilaporkan melalui **web SP2KP** dan <https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/> ;
- b. **Survei harga terhadap 11 bahan pokok** masing-masing di 3 titik /pedagang untuk dientry di aplikasi **panel harga**;
- c. **Pelaporan harian** di aplikasi website/link kemendagri (wasinflasi.kemendagri.go.id);
- d. **pemantuan dan monitoring stok LPG 3 kg** pada tanggal 4 Februari 2025.
- e. **Operasi Pasar dan Pasar Murah:** Pemerintah Kota Mojokerto secara aktif melaksanakan operasi pasar dan pasar murah untuk menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Tercatat **23 kali** pelaksanaan kegiatan ini, terdiri dari **6 kali operasi pasar** dan **17 kali pasar murah**.
  - Operasi Pasar Murah 8 Januari 2025
  - Operasi Pasar Murah 15 Januari 2025
  - Operasi Pasar Murah 22 Januari 2025
  - Operasi Pasar Murah 23 Januari 2025
  - Operasi Pasar Murah 24 Januari 2025
  - Operasi Pasar Murah 30 Januari 2025
  - Operasi Pasar Murah 31 Januari 2025
  - Operasi Pasar Murah 31 Januari 2025
  - Operasi Pasar Murah 5 Februari 2025
  - Operasi Pasar Murah 6 Februari 2025 di Pasar Prajurit kulon
  - Operasi Pasar Murah 7 Februari 2025 di Pasar Tanjung
  - Operasi Pasar Murah 12 Februari 2025 di 14 Pracangan TPID
  - Operasi Pasar Murah 20 Februari 2025 di 12 Pracangan TPID
  - Operasi Pasar Murah 26 Februari 2025 di 11 Pracangan TPID
  - Operasi Pasar Murah 5 Maret 2025 di 10 Pracangan TPID
  - Operasi Pasar Murah 11 di Pasar Ketidur
  - Operasi Pasar Murah 12 Maret 2025 di 10 Pracangan TPID
  - Operasi Pasar Murah 13 Maret 2025 di Pasar Ketidur
  - Operasi Pasar Khusus Minyakita 14 Maret 2025 di Pasar Tanjung Anyar
  - Operasi Pasar Murah khusus 24 Februari-29 Maret 2025 (selama Bulan Ramadhan) di Kantor POS;
  - Pasar Murah Takjil di Pasar Ketidur (selama Bulan Ramadhan);
  - Pasar murah Bersama Bank Indonesia program tebus murah Minyak goreng harga Rp 1 melalui QRIS;
  - Operasi pasar khusus minyakita 17-18 Maret 2025.

**f. Sidak Pasar dan Distributor:** Untuk memastikan tidak terjadi penahanan barang yang dapat mengganggu distribusi dan memicu kenaikan harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Mojokerto bersama dengan Satgas Pangan Polres Mojokerto Kota dan Forkopimda telah melaksanakan **3 kali sidak** yakni:

- Sidak ke Pasar Tradisional oleh TPID Kota Mojokerto dan Satgas Pangan

Polres Mojokerto Kota tanggal 13 Februari 2025 dalam rangka menjaga keterjangkauan harga ;

- Sidak ke Pasar Tanjung Anyar oleh TPID Kota Mojokerto dan Satgas Pangan Polres Mojokerto Kota tanggal 10 Maret 2025 dalam rangka persiapan HBKN;
- Sidak ke Gudang Bulog dan Pasar Tradisional serta Ritel Modern oleh TPID Kota Mojokerto Bersama Forkopimda tanggal 18 Maret 2025 dalam rangka menjaga keterjangkauan harga dan menjaga stok kebutuhan selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H (2025).
- 

## II. **Ketersediaan Pasokan:**

- a. Mengintensifkan pasar murah di 26 toko /Pracangan TPID di seluruh wilayah Kota Mojokerto, bekerjasama dengan Bulog Cabang Mojokerto untuk menjaga suplay/stok beras khususnya SPHP di masing-masing toko/Pracangan TPID;
- b. **Kerjasama Antar Daerah (KAD):** Pemerintah Kota Mojokerto berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD). Hingga saat ini, KAD telah dilaksanakan dengan **10 daerah lain** antara lain dengan:
  1. Kab. Mojokerto
  2. Kab. Malang
  3. Kota Batu
  4. Kab. Jombang
  5. Kab. Nganjuk
  6. Kab. Madiun
  7. Kota Madiun
  8. Kab. Magetan
  9. Kota Probolinggo
  10. Kab. Lumajang
- c. Melaksanakan Gerakan menanam Bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) di seluruh kelurahan di Kota Mojokerto

## III. **Kelancaran Distribusi:**

- a. **Pemberian Subsidi angkut/bantuan Transport dalam Operasi Pasar:** Sebagai bagian dari pelaksanaan operasi pasar, anggaran sebesar **Rp 633.900** telah direalisasikan untuk belanja bantuan transport sebanyak **62 kali** pengiriman komoditas.
- b. Memberikan angkutan gratis bagi pelajar;
- c. Pemeliharaan jalan rutin untuk kelancaran distribusi.

## IV. **Komunikasi Efektif:**

- a. Melaksanakan rapat koordinasi TPID Kota Mojokerto
- b. Rakor terkait kenaikan IPH 7 Januari 2025
- c. Rakor pengawasan LPG dan BBM subsidi
- d. Rakor pengendalian inflasi mingguan Bersama Kemendagri
- e. Koordinasi antar stakeholder pengampu pengendalian inflasi, TPID Kota Mojokerto secara intensif berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam pengendalian inflasi di Kota Mojokerto yakni Bulog Cabang Mojokerto, Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, Satgas Pangan Polres Mojokerto Kota, Kodim 0815 Mojokerto serta Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.

Koordinasi dengan daerah penghasil.

f.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

##### **1). Keterjangkauan Harga:**

Upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam menjaga keterjangkauan harga cukup terlihat melalui pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah yang berjumlah 23 kali. Kegiatan ini, yang tersebar di berbagai lokasi strategis dan berlangsung secara rutin, terutama menjelang dan selama Bulan Ramadhan, menunjukkan respons terhadap potensi kenaikan permintaan dan harga. Komoditas yang dijual, seperti Minyakita, gula, telur, dan beras, merupakan kebutuhan pokok yang signifikan dalam pengeluaran masyarakat. Namun, perlu dicermati bahwa realisasi anggaran untuk kegiatan ini, sebesar Rp 21.301.440 dari pagu Rp 76.650.000, mengindikasikan bahwa skala dan intensitas operasi pasar mungkin belum optimal untuk memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap harga pasar secara keseluruhan. Evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas penurunan harga di pasar setelah pelaksanaan operasi pasar dan jangkauan sasaran program perlu dilakukan.

##### **2). Ketersediaan Pasokan:**

Inisiatif Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan 10 daerah lain merupakan langkah positif dalam mengamankan pasokan komoditas ke Kota Mojokerto. Mengingat status Kota Mojokerto sebagai daerah non-penghasil, ketergantungan pada pasokan dari luar daerah sangat tinggi. Namun, informasi yang terbatas mengenai komoditas spesifik yang disuplai melalui KAD dan volume pasokannya menyulitkan evaluasi yang komprehensif. Tanpa data yang jelas, sulit untuk menilai sejauh mana KAD telah berkontribusi dalam menstabilkan pasokan dan mengurangi kerentanan Kota Mojokerto terhadap fluktuasi pasokan dari daerah produsen. Efektivitas KAD dalam jangka panjang perlu diukur untuk memastikan keberlanjutan pasokan dan stabilitas harga.

##### **3). Kelancaran Distribusi:**

Pemerintah Kota Mojokerto menunjukkan perhatian terhadap kelancaran distribusi melalui pelaksanaan sidak pasar dan distributor sebanyak 3 kali. Sidak ini bertujuan untuk mencegah praktik penahanan barang yang dapat mengganggu pasokan dan memicu kenaikan harga. Selain itu, pemberian bantuan transportasi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.633.900 untuk 62 kali pengiriman, merupakan upaya untuk memfasilitasi distribusi dan menekan biaya logistik. Namun, realisasi anggaran bantuan transportasi yang belum maksimal mengindikasikan adanya potensi inefisiensi atau kebutuhan yang belum terpenuhi sepenuhnya. Efektivitas sidak dalam jangka panjang sebagai langkah pencegahan juga perlu dianalisis lebih lanjut.

##### **4). Komunikasi Efektif:**

Aspek komunikasi dalam kebijakan pengendalian inflasi di Kota Mojokerto belum terlihat secara jelas dalam data yang diberikan. Tidak adanya informasi mengenai upaya penyampaian informasi harga, ketersediaan barang, dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat merupakan sebuah kekurangan. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, memberikan informasi yang akurat, mencegah kepanikan yang dapat memicu *panic buying*, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap upaya



pemerintah. Ketiadaan informasi ini menyulitkan evaluasi dampak komunikasi terhadap pengendalian inflasi.

### **Kesimpulan Evaluasi:**

Secara keseluruhan, kebijakan pengendalian inflasi di Kota Mojokerto menunjukkan respons terhadap dinamika harga, terutama melalui intervensi pasar dan pengawasan distribusi. Namun, efektivitas kebijakan perlu ditingkatkan dengan fokus pada keberlanjutan dampak, optimalisasi anggaran, dan penguatan strategi komunikasi. Mengingat kerentanan Kota Mojokerto sebagai daerah non-penghasil, perhatian khusus perlu diberikan pada penguatan kerjasama dengan daerah penghasil dan memastikan kelancaran rantai pasokan. Evaluasi yang lebih mendalam dengan data yang lebih komprehensif, terutama terkait dampak KAD dan efektivitas setiap intervensi, diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.**

### **I. Keterjangkauan Harga:**

- **Optimalkan Realisasi Anggaran Intervensi Pasar:** Maksimalkan penyerapan anggaran yang tersedia untuk operasi pasar dan pasar murah dengan fokus pada komoditas yang paling berkontribusi terhadap IPH dan menyasar masyarakat yang membutuhkan.
- **Percepat Implementasi BTT:** Prioritaskan penyelesaian Perwali BTT agar dana dapat segera digunakan untuk stabilisasi harga jika terjadi lonjakan harga yang signifikan.
- **Evaluasi Harga Jual Intervensi Pasar:** Pastikan harga jual komoditas dalam operasi pasar benar-benar terjangkau dan lebih rendah dari harga pasar.

### **II. Ketersediaan Pasokan:**

- **Perkuat KAD dengan Monitoring Efektif:** Tidak hanya melaksanakan KAD, tetapi juga memantau secara aktif realisasi pasokan dan dampaknya terhadap harga di Kota Mojokerto.
- **Identifikasi dan Diversifikasi Sumber Pasokan:** Lakukan pemetaan potensi sumber pasokan komoditas utama dari daerah lain untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau dua daerah.
- **Fasilitasi Informasi Pasar:** Berikan informasi kepada pedagang dan distributor mengenai potensi pasokan dari daerah KAD.

### **III. Kelancaran Distribusi:**

- **Intensifkan Sidak dengan Fokus Pencegahan:** Sidak tidak hanya dilakukan saat terjadi gejolak harga, tetapi juga secara rutin sebagai upaya pencegahan potensi penahanan barang.
- **Evaluasi Efektivitas Subsidi Transportasi:** Analisis dampak subsidi transportasi terhadap harga dan efisiensi distribusi. Pertimbangkan mekanisme subsidi yang lebih tepat sasaran jika diperlukan.
- **Koordinasi dengan Pihak Logistik:** Jalin komunikasi dengan penyedia jasa logistik untuk memastikan kelancaran distribusi komoditas.

### **IV. Komunikasi Efektif:**

- **Publikasi Informasi Harga yang Lebih Sering:** Meningkatkan frekuensi publikasi informasi harga komoditas pokok dan ketersediaan stok kepada masyarakat.

**Sosialisasi Hasil dan Dampak Kebijakan:** Informasikan kepada masyarakat mengenai hasil dan dampak dari kebijakan pengendalian inflasi yang telah dilakukan.

- **Libatkan Media Lokal:** Gandeng media lokal untuk menyebarkan informasi positif dan edukasi mengenai pengendalian inflasi.

Dengan menerapkan rekomendasi ini secara komprehensif dan didukung oleh pemantauan serta evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan pengendalian inflasi di Kota Mojokerto pada triwulan berikutnya dapat lebih efektif.